

BAB II

MUKTAMAR NU KE-27 TAHUN 1984 DI SITUBONDO

A. Latar Belakang dilaksanakannya Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo

NU adalah organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*) yang berbasis di dunia pesantren dengan para kiai sebagai pemimpinnya. Solahudin bahkan berpendapat bahwa NU biasanya disebut pesantren besar dan pesantren disebut sebagai NU kecil.²³ Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang telah melalui banyak peristiwa sejarah dan perubahan zaman, namun organisasi ini selalu mampu berdiri tegak dalam melawan derasnya arus perubahan zaman.

Seperti yang diungkapkan Dhofier, organisasi Nahdlatul Ulama seperti yang kita kenal saat ini adalah pewaris dan penerus tradisi kiai. Yang mana NU telah mampu mengembangkan sesuatu yang stabilitasnya sangat mengagumkan, walaupun NU sendiri sering sekali mendapatkan tantangan-tantangan dari luar yang cukup berat. Menurutnya modal utama dari kesuksesan NU itu adalah karena para kiai mempunyai sesuatu perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi dengan selalu menghormati tradisi. Rahasia keberhasilan kiai dalam mengembangkan sistem organisasi yang kuat dan stabil itu terletak pada kebijaksanaan dan kesadaran mereka bahwa struktur sosial yang manapun

²³ Solahudin, *Biografi 7 Rais A'am PBNU* (Kediri: Nour Pustaka Utama, 2012), v.

haruslah mempercayai *general consensus*²⁴, bukan mempercayakan atau menggantungkan persetujuan yang dipaksakan atau sistem organisasi yang rumit.²⁵ Hal ini menggambarkan bahwa kesepakatan dengan musyawarah bersama adalah salah satu ciri NU sebagai organisasi keagamaan yang berlandaskan demokrasi meskipun kiai memiliki pengaruh yang kuat pada organisasi ini. Musyawarah-musyawarah tersebut biasanya dilakukan oleh para kiai dan anggota NU setiap lima tahun sekali dalam Munas dan Mukttamar yang sudah berjalan sejak NU pertama kali dibentuk.

Organisasi Nahdlatul Ulama sekarang sudah berusia sekitar 87 tahun sejak resmi berdiri tahun 1926 meski sebenarnya *jam 'iyyah* ini secara tradisi sudah ada jauh sebelum itu. Dalam rentan 87 tahun tersebut NU sudah mengadakan 32 kali muktamar yang terakhir diadakan di Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 22-28 Maret 2010. Mukttamar di Makasar ini merupakan mukttamar pertama yang diadakan di pulau Sulawesi. Mukttamar NU yang pertama sendiri dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926 dengan ketua umum Hasan Gipo.²⁶

Mukttamar NU adalah lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan ART (Anggaran Rumah Tangga) Nahdlatul

²⁴ Dalam kamus ilmiah populer *Consensus* atau dalam bahasa Indonesia Konsensus adalah persetujuan, kesepakatan bersama, kata sepakat. Kesepakatan tersebut mengenai kesepakatan sebuah pendapat, pendirian dan lain-lain yang dicapai melalui kebulatan suara.

²⁵ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, 45.

²⁶ Muhammad Shodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU Refleksi Perjalanan KH Hasyim Muzadi*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 52.

Ulama bab XIX tentang permusyawaratan tingkat nasional pada pasal 50 ayat 1 yang berbunyi: “Muktamar adalah instansi permusyawaratan tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama, diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali dalam lima tahun”. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa muktamar dipimpin oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada ayat 3 juga dijelaskan bahwa muktamar dihadiri oleh: pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pada ayat 4 menjelaskan bahwa muktamar adalah sah bila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang yang sah. Hal tersebut berdasarkan hasil-hasil muktamar NU ke-30 di pondok pesantren Lirboyo Kediri.²⁷

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Muktamar NU adalah instansi atau lembaga permusyawaratan tertinggi dalam tubuh NU yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh PBNU dan dihadiri oleh anggota-anggota dari seluruh pengurus wilayah atau cabang dengan dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah wilayah dan cabang yang sah dengan tujuan untuk mengevaluasi program selama lima tahun kedepan. Muktamar NU sendiri sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, dalam bab XIX, pasal 50-56 menempati posisi tertinggi dalam permusyawaratan. Sedangkan jenis dan tingkat permusyawaratan NU sendiri adalah:

1. Muktamar
2. Konperensi Besar

²⁷ Ibid., 51.

3. Musyawarah Nasional Alim Ulama
4. Konperensi Wilayah
5. Konperensi Cabang
6. Rapat Anggota²⁸

Muktamar NU sendiri memainkan peranan tersendiri dalam perjalanan panjang organisasi Nahdlatul Ulama. Dimana arah pergerakan serta perjuangan NU untuk menghadapi dinamika masyarakat atau politik di tetapkan dan di evaluasi dalam setiap diadakanya muktamar. Muktamar NU yang paling mendapatkan sorotan dan perhatian kaum Nahdliyin adalah muktamar yang ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur. Muktamar yang ke-27 ini merupakan periode terpenting dalam sejarah panjang NU yang diadakan di pondok pesantren Salafiah Syafiiyah Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo Jawa Timur.

Dipilihnya Situbondo sebagai lokasi muktamar juga mengandung arti yang sangat penting. Berbeda dengan lokasi muktamar sebelumnya yang diadakan di kota besar, seperti Surabaya dan Semarang yang merupakan ibu kota dari propinsi Jawa Timur dan Jawa tengah. Situbondo adalah daerah terpencil di Jawa Timur, bahkan lebih tipikal sebagai daerah pesantren. Dipilihnya tempat ini selain untuk

²⁸Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: Lkis, 2011), 132.

memberi penghargaan kepada KH. As'ad Syamsul Arifin²⁹, sebagai tokoh senior NU, sekaligus juga mengekspresikan suatu hubungan yang lebih besar.³⁰

Tema dari muktamar ini adalah “**Dengan Khittah NU 1926, Menggalang Kebersamaan Dan Meluaskan Peranserta Dalam Pembangunan Untuk Meningkatkan Khidmah Kepada Agama, Bangsa dan Negara**”. Sedangkan tujuan dari muktamar ini adalah:

1. Mengesahkan hasil Munas Alim Ulama NU di Situbondo.
2. Membahas berbagai Masail Fiqhiyyah.
3. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga NU.
4. Menyusun program kerja Nahdlatul Ulama 1985-1989.
5. Menyusun berbagai macam rekomendasi.
6. Memilih Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1985-1989.³¹

²⁹ Pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyyah Asem Bagus Situbondo, ia pernah menjadi anggota Konstituante tahun 1957-1959. Kyai asal Madura ini adalah kiai yang paling senior diantara para kiai besar saat itu, satu-satunya murid kiai legendaris, kiai Kholil Bangkalan yang masih hidup dan salah satu dari sedikit orang yang pernah belajar kepada kiai Hasyim Asy'ari. Menurut Martin Van Bruinessen, kiai As'ad tidak mempunyai reputasi tinggi dalam bidang pengetahuan agama tetapi dikenal dikalangan masyarakat Madura karena kesaktiannya dan pesantrennya di Situbondo merupakan salah satu pesantren terbesar di Jawa. Martin Van Bruinessen juga menambahkan bahwa pengaruh dari kiai As'ad sendiri sekitar pertengahan tahun 1983 telah melampaui pengaruh Rais A'am pada saat itu, kiai Ali Ma'shum. Martin Van Bruinessen, 125.

³⁰ Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 133.

³¹ Tim Kerja Museum NU, *Keputusan Muktamar NU ke 27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo-Asembagus-Situbondo-Jatim* (Surabaya: Musium Nahdlatul Ulama), 51. Diambil dari buku asli yang disusun oleh Panitia Daerah Muktamar NU ke-27 yang berjudul, *MUKTAMAR NU KE 27 DI SITUBONDO 8-12 DESEMBER 1984*.

Muktamar Situbondo adalah muktamar yang paling penting untuk Nahdlatul Ulama karena merupakan langkah besarnya dalam mengembalikan NU pada tujuan awal didirikannya organisasi. Pada muktamar ini pula Abdurrahman Wahid kemudian diangkat menjadi ketua Tanfidziah NU.

B. Proses Menuju Dilaksanakannya Muktamar NU ke 27 di Situbondo

Sebelum diadakannya Muktamar Situbondo, telah sukses diadakan Munas Alim Ulama tahun 1983 di tempat yang sama. Munas ini sendiri diketuai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan dilaksanakan oleh para kiai NU dan Dewan Syariah, membuat jalan menuju pengambilan dalam Muktamar tahun 1984 semakin mudah. Hal ini dikarenakan munas dalam kedudukannya dibawah muktamar, biasanya agenda apa yang akan dibicarakan atau keputusan apa yang akan diambil dalam muktamar terlebih dahulu dibicarakan di munas untuk kemudian diajukan ke muktamar.

Munas sendiri merupakan forum yang menjadi wadah musyawarah antarulama dan dimaksudkan untuk menghimpun rekomendasi yang akan diajukan ke dalam muktamar. Dalam kedudukannya munas tidak mempunyai otoritas untuk mengubah anggaran dasar, mengubah NU, keputusan-keputusan muktamar, ataupun komposisi kepengurusan pusat. Meski begitu munas sendiri mempunyai kekuatan moral tersendiri.³²

³² Ibid., 127.

Sebelum dilaksanakan munas tahun 1983, para ulama mengadakan pertemuan yang menentukan masa depan NU itu berlangsung di Surabaya pada 1 Mei 1982, kota yang mempunyai arti historis bagi NU karena di kota inilah NU didirikan. Dengan tindakan itu mereka menunjukkan kembali kapasitasnya sebagai ulama. Hal yang dilakukan ulama-ulama ini sebenarnya tidak melalui prosedur yang berada di AD/ART NU karena dirasa bahwa prosesnya akan rumit bila mengikuti AD/ART, padahal saat itu NU membutuhkan tindakan yang segera, karena saat itulah para ulama melalui Rais A'am Ali Maksum, tampil dengan menggunakan hukum Islam. Pertemuan para ulama ini merupakan cikal bakal diadakannya munas karena para ulama menyadari bahwa perlunya diadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU (Munas NU) terlebih dahulu yang menjadi rekomendasi bagi Muktamar NU ke 27.³³

Selain pertemuan di Surabaya pada Mei 1982, para ulama setahun berikutnya juga mengadakan pertemuan di Jakarta yang tak kalah pentingnya dengan pertemuan tahun sebelumnya. Dalam pertemuan di Jakarta pada Mei 1983, dihadiri oleh 24 warga NU yang pro-pembaruan (karena itu disebut Majelis 24), didiskusikan berbagai gagasan yang ingin diajukan kelompok pembaharu di dalam munas yang akan datang. Berbagai pemikiran terwakili dalam majelis 24 ini. Di samping empat orang pembaharu (Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Mustofa Bisri, dan Muhammad Thohir), terdapat kiai Sahal Mahfudh dan kiai

³³ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, 167.

Muchith Muzadi³⁴ dari Jember, M. Zamroni (mantan aktifis mahasiswa), Mahbub Junaidi (wartawan-politisi), Abdullah Syarwani dan Said Budairi (keduanya aktifis Ornop), Slamet Efendi Yusuf dan Masdar Farid Mas'udi (pemimpin mahasiswa dan pemikir muda yang sangat menjanjikan). Majelis 24 ini memilih sebuah tim kerja yang terdiri dari tujuh orang (Tim Tujuh)³⁵. Tim ini bertugas merumuskan usulan-usulan yang dijuluki "Pemulihan Khittah", kedalam bentuk tulisan.³⁶

Di antara beberapa keputusan Munas NU, ada tiga yang paling penting, yaitu: pemulihan Khittah NU 1926, deklarasi hubungan Pancasila dan Islam serta rekomendasi larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Munas 1983 membahas empat masalah, antara lain:

1. Pemulihan NU terhadap Khittah 1926³⁷. NU kembali menjadi organisasi keagamaan dengan mengarahkan program NU kepada situasi pembangunan dan mengatur perangkat organisasi yang mendukung cita-cita NU sesuai Khittah 1926.

³⁴ Alumnus Ponpes Tebuireng Jombang, masuk dalam organisasi NU pada umur 16 tahun. Sering bertindak sebagai sekertaris kiai Achmad Siddiq dan dipercaya banyak orang sebagai orang yang bertanggung Jawab atas bagian perumusan Khittah Nahdliyah Achmad Siddiq. *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*,134

³⁵ Anggota dari Tim Tujuh ini adalah Abdurrahman Wahid, Zamroni, Said Budairy, Mahbub Djunaidi, Fahmi Saifuddin, Danial Tanjung dan A. Bagdja, semuanya adalah pemuda yang menetap di Jakarta. Mustofa Bisri tidak menjadi anggota tim ini, tetapi memberikan sumbangan penting kepada gagasan yang dirumuskan dan diimplementasikannya kemudian. Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*,133.

³⁶ Martin Van Bruinessen, ,134.

³⁷ Khittah NU 1926 artinya adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan. Kesimpulan ini sebenarnya merupakan rumusan dari intisari perjalanan sejarah khidmad NU serta pandangan wawasan dan tingkah laku NU sejak berdiri tahun 1926.

2. Pemantapan kembali Pancasila sebagai asas organisasi. Dibahas penerimaan Pancasila sebagai asas dan penjabarannya dalam Anggaran Dasar.
3. Penegasan batasan-batasan bagi penyaluran aspirasi politik warga NU melalui kekuatan sosial politik yang ada.
4. Pembahasan masalah keagamaan, (*masail diniyah*)³⁸.

Munas Situbondo ini juga menandai munculnya duet kepemimpinan Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid. Dengan dukungan yang kuat dari para ulama senior NU (KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Machrus Ali, KH. Ali Ma'shum, dan KH. Masykur) kiai Achmad Siddiq yang fasih berbicara merupakan instrumen yang bisa menyakinkan para peserta munas untuk menerima secara formal keputusan-keputusan di atas. Sementara itu Abdurrahman Wahid sebagai ketua panitia persiapan sangat aktif mengajak (melalui serangkaian konsultasi yang hati-hati dengan pejabat pemerintah senior) untuk memformulasi kerangka kerja yang bisa disetujui dan saling menguntungkan. Melalui proses ini, dia menjalin hubungan erat dengan Benny Moerdani.³⁹ Abdurrahman Wahid juga berperan besar dalam pengarahannya diskusi dalam sidang-sidang munas untuk menerima resolusi yang dirumuskan oleh KH. Achmad Siddiq. Melalui Munas ini,

³⁸ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, 172.

³⁹ Jendral Leonardus Benny Moerdani adalah orang kuat di lingkungan ABRI pada awal dekade 80-an. Waktu itu menjabat sebagai panglima Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pemegang kendali utama militer.

kiprah duet Achmad Siddiq dan Abdurrahman Wahid diakui secara luas dan semakin memantapkan posisi kepemimpinan mereka dalam Mukhtamar NU tahun 1984.⁴⁰ Munas sendiri berhasil menyepakati tiga buah keputusan dalam bidang pemulihan khittah NU 1926. Rangkaian itu berupa:

1. Deklarasi, yang merupakan rumusan pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila, deklarasi tersebut merupakan dasar moral bagi kedua keputusan lainnya.
2. Rancangan Mukaddimah Anggaran Dasar NU, yang merupakan kerangka ideal yang bersumber pada dasar-dasar moral diatas, kerangka ideal ini merupakan jiwa dari Anggaran dasar dan menentukan orientasi dan wawasannya.
3. Pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khittah NU 1926, yang juga mencantumkan ketetapan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Diktum ini merupakan mekanisme yang merupakan mekanisme yang mewujudkan wawasan ideologis mukadimah Anggaran Dasar dalam bentuk ikatan yuridis formal yang berlaku operasional bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama.⁴¹

⁴⁰Greg Fealy dkk, 132.

⁴¹Panitia Musyawarah Nasional NU, *Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Pada Tanggal 13-16 Rab Awal 1404/18-21 Desember 1983 Di Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur* (Jakarta: PBNU, 1984), 2.

Rangkaian keputusan tersebut harus difahami sebagai sebuah keseluruhan dan tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Hasil munas yang disebutkan diatas kemudian disahkan pada muktamar setahun berikutnya.

Muktamar yang ke 27 tahun 1984 di Situbondo ini diketuai oleh abdurrahman wahid dengan pelindung KH. As'ad Syamsul Arifin dan pengurus besar nahdltul ulama sebagai penasehat. Pada saat muktamar tiba, terasa seolah anggota NU diseluruh Indonesia berkumpul di Situbondo, hingga menggerakkan salah satu surat kabar untuk memuat berita di halaman depan bertajuk: "Gelombang Manusia Yang Tak Terhingga". Tak terhingga juga adalah gelombang pejabat tokoh-tokoh pemerintah senior dan pejabat-pejabat tinggi, sipil maupun militer yang hadir memenuhi kota kecil itu. Diantara mereka yang hadir adalah presiden Soeharto. Tidak diragukan lagi bahwa kehadiran para pejabat pemerintah menandakan perhatian yang lebih terhadap keputusan muktamar. Muktamar ini sendiri berlangsung antara tanggal 8-13 Desember 1984.⁴²

Persiapan menuju muktamar ke 27 di Situbondo (8-12 Desember 1984) berjalan mulus. Panitia tidak kesulitan mengenai biaya muktamar tersebut, karena pada waktu itu kiai As'ad menanggung semua biaya yang dibutuhkan. Bantuan warga NU yang masuk seminggu sebelum pelaksanaan muktamar berupa beras 30 ton, sapi 24 ekor, kambing 120 ekor, dan ayam ribuan ekor mengalir deras kepesantren *salafiah syafi'iyah* Asembagus Situbondo. Pemerintah melalui Kodam

⁴² Greg Fealy dkk, 134.

V Brawijaya menugaskan anggotanya untuk mendirikan tenda raksasa dan dapur umum lengkap dengan juru masaknya. Selain tenda dan 46 kompor masak ala tentara, juga disiapkan 2000 velbed untuk ribuan penggembira muktamar yang menginap di pondok.⁴³ Muktamar ini dibuka oleh presiden Soeharto yang juga dihadiri 26 pimpinan wilayah (provinsi) dan 370 pimpinan cabang (kabupaten atau kota) serta diramaikan sekitar 10.000 pengunjung.⁴⁴ Jadwal acara muktamar NU ke 27 tanggal 8-13 Desember 1984 di Situbondo yang diambil dari buku petunjuk pelaksanaan muktamar ini penulis lampirkan pada halaman lampiran yang disertakan di akhir tulisan.

Selain ditujukan untuk mengesahkan hasil dari munas alim ulama Situbondo setahun sebelumnya, pada muktamar ini juga ditujukan untuk menetapkan pengurus baru Nahdlatul Ulama periode lima tahun kedepan. Proses pemilihan ini menggunakan konsep yang telah didiskusikan oleh 35 kiai senior dan rais syuriah PWNU seluruh Indonesia. Diskusi ini berhasil menyepakati konsep pemilihan pengurus baru. Konsep pemilihan dari kiai Achmad Siddiq yang kemudian disetujui oleh para ulama tersebut adalah dengan *ahlul halli wal aqdi*, yaitu memilih seorang ulama yang berkompeten, yang kemudian menunjuk enam ulama *ahlul halli wal aqdi*. Selasa malam tanggal 11 Desember 1984, dilakukan pemilihan seorang ulama yang berkompeten sebagai *ahlul halli wal aqdi*, yang

⁴³ Ibid., 27.

⁴⁴ Ibid., 28.

kemudian Kiai As'ad terpilih sebagai *ahlul halli wal aqdi*.⁴⁵ Kiai As'ad kemudian menunjuk enam pembantu dan mengajak mereka berdiskusi selama sekitar 25 menit di kantor pesantren. Keenam ulama yang ditunjuk adalah KH. Ali Ma'shum, KH. Machrus Ali, KH. Masykur, KH. Achmad Siddiq, KH. Saifuddin Zuhri dan KH. Munasir Ali. Mereka kemudian berhasil menetapkan ketua baru dalam bidang syuriah dan tanfidziah NU.

C. Hasil-hasil Muktamar NU yang ke-27 di Situbondo

Muktamar NU yang ke 27 Situbondo berhasil menyepakati beberapa keputusan penting. Muktamar yang berlangsung antara tanggal 8-12 Desember 1984 antara lain berhasil menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar organisasi NU.
2. Pemulihan keutamaan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supremasi Syuriah atas Tanfidziah dalam status dan hukum.
3. Penarikan diri dari politik praktis dengan cara melarang pengurus NU secara bersama memegang kepengurusan di dalam partai politik.
4. Pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang non politik.⁴⁶

⁴⁵ Choirul anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978*, 30

⁴⁶ *Ibid.*, 134.

Keputusan Mukhtamar NU yang ke 27 ini memang tidak terlepas dari hasil munas tahun sebelumnya ditempat yang sama. Seperti yang penulis sebutkan di atas bahwa Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo memutuskan hal terpenting yaitu NU menerima Pancasila dan memulihkan NU menjadi organisasi keagamaan sesuai dengan Khittah 1926. Keputusan munas itulah yang kemudian dikukuhkan pada Mukhtamar ke 27 yang berlangsung pada 8-12 Desember 1984 di Situbondo Jawa Timur. Mukhtamar Nahdlatul Ulama tahun 1984 ini merupakan saat terjadi perubahan yang sangat dramatis dalam kepemimpinan dan organisasi. Berubahnya orientasi organisasi dan naiknya kepemimpinan KH. Achmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin utama NU telah membangkitkan kembali organisasi dan membawa tujuan-tujuan baru dengan berbagai aktifitasnya. Demikianlah, NU meninggalkan hingar bingar politik praktis, memperkuat kembali kedudukan ulama serta memperbarui komitmennya pada persoalan-persoalan sosial keagamaan.⁴⁷ Keputusan tersebut biasa dikenal dengan kembali ke “Khittah 1926”.

Nahdlatul Ulama sebagai *jam 'iyyah diniyah* adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M. Organisasi ini didirikan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunah wal*

⁴⁷ Greg Fealy dkk, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*,138.

jama'ah dan menganut salah satu dari empat mazdzab. Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Hal inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.⁴⁸

Secara harfiah Khittah (خِطَّةً) artinya garis-garis yang diikuti, garis yang biasa ditempuh atau garis yang selalu ditempuh. Jika kata Khittah digabungkan dengan kata Nahdlatul Ulama, maka dapat diartikan garis yang biasa diikuti dan selalu ditempuh oleh NU serta anggotanya dalam kiprahnya mewujudkan cita-cita dan dituntun oleh faham keagamaannya sehingga membentuk kepribadian Khas Nahdlatul Ulama. Istilah khittah pertama kali digunakan oleh Achmad Siddiq dalam buku kecil yang diterbitkan sebelum muktamar tahun 1979 yang berisi rumusan gagasan, cita-cita, sikap dan kegiatan yang ingin dikembangkan NU pada zaman para pendiri terdahulu.⁴⁹ Inilah hakikat Khittah NU yang kemudian dirumuskan pada Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur. Pada muktamar ini terlahir rumusan naskah Khittah Nahdlatul Ulama.⁵⁰

⁴⁸ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, 47.

⁴⁹ Martin Van Bruinessen, 129.

⁵⁰ *Ibid.*, 15.

Dalam Naskah Khittah Nahdlatul Ulama butir I atau Mukadimah menyatakan: “ NU mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama”. Sedangkan menurut kiai Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyah adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak bagi warga negara maupun pemimpin NU. Landasan ini mengandung unsur-unsur keagamaan, kemasyarakatan, madzhab, kepemimpinan ulama, bidang garapan, sistem pembinaan umat dan karakter *tawassuth* - moderat, dan toleran.⁵¹ Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.”

Meski pada tahap awal Khittah NU belum dirumuskan secara sistematis, tetapi generasi-generasi awal NU memahami dan menghayatinya, sehingga perjalan NU dan kaum Nahdliyin tetap berada pada garis Khittah itu. Cikal bakal rumusan Khittah NU adalah buku yang ditulis oleh KH. Achmad Siddiq yang berjudul “ Khittah Nahdliyyah” (1979).⁵² Buku tersebut mendapat respon yang sangat positif dan antusias dari kalangan generasi muda NU yang kemudian menyelenggarakan pertemuan 24 (1982) yang membentuk tim 7 yang kemudian berhasil merumuskan dokumen “NU menatap masa depan”. Disusul dengan diselenggarakannya Musyawarah Alim Ulama NU (1983) di Situbondo, kemudian

⁵¹ Choirul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa Suka Duka Mengikuti Gus Dur Sejak 1978* (Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 2010), 32.

⁵² Naskah ini dapat kita jumpai pada musium NU yang terletak di jalan Gayungsari Timur No. 35 Surabaya.

Muktamar NU ke-27 di tempat yang sama. Muktamar ini berhasil menetapkan rumusan (naskah) Khittah Nahdlatul Ulama (tanpa ada kata-kata “kembali kepada Khittah” dan tanpa kata-kata “1926”).⁵³

Dalam keputusan Munas Alim Ulama tahun 1983 tentang “pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926”, ada empat hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, sebagai organisasi keagamaan NU telah mengalami hambatan karena kurangnya ikhtiar kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masa. Kedua, karena keterlibatannya di dalam kegiatan politik praktis secara berlebihan, NU menjadi kurang peka menghadapi perkembangan sehingga NU tidak berjalan sesuai dengan hakikatnya sebagai organisasi keagamaan. Ketiga, sudah menjadi tekad NU untuk senantiasa terikat dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, ulama sebagai unsur utama NU menyadari keprihatinan akan perkembangan NU dan merasa perlu menegaskan pedoman dan petunjuk bagi perkembangan organisasi.⁵⁴

Selama menjadi partai politik NU telah mengalami keaburan identitas. NU pada dasarnya adalah organisasi keagamaan, akan tetapi dengan menjadi partai politik maka ia lebih terpaku pada prestasi dan prestise politik dari pada menanggapi perkembangan di sekitarnya secara keagamaan. Kembali menjadi organisasi keagamaan adalah cara terbaik bagi NU untuk membenahi

⁵³ Ibid., 16.

⁵⁴ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, 196

kelemahannya selama menjadi partai politik dan menegaskan kembali peranan ulama. Khittah 1926 adalah ciri khas NU sebagai organisasi keagamaan yang dipimpin oleh ulama. Melalui ulama, NU berusaha menghimpun umat Islam untuk melakukan kegiatan dengan tujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat martabat manusia. Ciri khas NU sebagai organisasi keagamaan ini sempat menjadi kabur saat NU menjadi partai politik sebelum NU menyatakan diri kembali ke Khittah NU 1926.⁵⁵

Khittah 1926 adalah landasan berfikir, bersikap dan bertingkah laku warga Nahdlatul Ulama dalam semua tindakan dan kegiatan (organisasi) serta dalam setiap pengambilan keputusan. Landasan didapat dengan mengambil intisari dari cita-cita dasar pada awal didirikannya NU yakni sebagai wadah pengkhitmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah swt. Khittah NU dengan dalam arti nyata adalah merupakan pencerminan dari apa yang dapat dilihat pada niat dan dorongan berdirinya, rumusan ikhtiar yang pernah dilakukan pada saat berdirinya serta pada intisari sejarah perjalanan hidupnya dalam pengabdian.⁵⁶ Kembali ke Khittah NU 1926 berarti mereorientasi jamiyah NU sebagaimana keberadaan pada saat didirikan tahun 1926. Kembalinya NU ke Khittah 1926 ini dilatarbelakangi oleh pengalaman politik NU sepanjang Orde Baru yang dinilai tidak membawa maslahat bagi NU dan warganya. Seperti yang diketahui, sejak

⁵⁵ Ibid., 197.

⁵⁶ Utsman Ihsan, "Kembali Ke Khittah 1926", (Tesis, UIN Jakarta Kerjasama Dengan UI, 1990), 157.

NU terjun kedalam politik praktis, hubungan NU dengan pemerintah Soeharto tidaklah harmonis. Politik NU semakin lama semakin tersingkir dari mainstream perpolitikan Orba. Disamping itu, energi NU banyak diserap untuk mobilisasi politik dan cenderung mengabaikan bidang sosial dan keagamaan. Situasi ini dipandang kurang kondusif untuk mengembangkan khidmad NU sesuai yang dicita-citakan oleh para muasis (pendiri NU).

Kembali ke Khittah berarti NU secara institusi tidak terikat dengan partai politik atau organisasi masyarakat manapun. Selain itu kesadaran akan keterlibatan NU dalam politik praktis yang terlalu jauh telah membawa dampak negatif bagi perkembangan organisasi karena adanya perilaku beberapa elit NU yang menonjolkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Hal tersebut mengakibatkan NU setahap demi setahap kehilangan perhatian terhadap bidang garapan yang semestinya dilakukan.⁵⁷

Sedangkan diambilnya keputusan kembali pada Khittah 1926 pada dasarnya adalah mengambil jarak secara organisatoris dengan kekuatan politik praktis, serta mengandung semangat penerimaan terhadap azaz tunggal Pancasila. Secara politis, Khittah 1926 menjadi momentum rekonsiliasi NU dan pemerintah Soeharto. Hal itu juga bisa diartikan menempatkan NU sebagai kekuatan independen yang strategis dan sebagai *pressure group* (kelompok penekan) yang

⁵⁷ M Mudhofi, "Artikulasi Politik NU Pasca Khittah 1926: Studi Analisis Tentang Dinamika Politik NU Sejak Muktamar Situbondo 1984 Hingga Muktamar Cipasung 1994", (Tesis, IAIN Medan Sumatra utara, 1998), 67.

efektif di tengah kekuatan hegemonik Orba. Dalam prespektif sosial budaya, Khittah 1926 merupakan momentum kebangkitan kembali NU sebagai *Jamiyah diniyah wa al-Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan sosial). Khittah 1926 berarti semangat kesadaran kolektif NU untuk kembali mereorientasikan diri pada pemberdayaan umat melalui kegiatan dakwah Islam, pengembangan ekonomi rakyat dan sebagainya.

Muktamar Situbondo mengadakan penyesuaian anggaran dasar organisasi. Jika anggaran dasar sebelumnya Islam merupakan asas dan Pancasila serta UUD 45 sebagai “landasan perjuangan”, maka anggaran dasar yang baru sebagaimana mestinya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang segera diikuti dengan kalimat bahwa NU adalah organisasi yang beraqidah Islam menurut paham *ahlussunan wal jama'ah* dan mengikuti salah satu mazhab empat. Penyesuaian ini menurut Martin Van Bruinessen nampaknya tidak menunjukkan perubahan besar dalam makna. Hal terpenting adalah tambahan yang dibuat dalam paragraf tentang tujuan organisasi yang direalisasikan dalam wadah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Penolakan implisit terhadap cita-cita negara Islam ini dialamatkan kepada kekhawatiran pemerintah dan secara tegas menunjukkan loyalitas NU terhadap NKRI.⁵⁸

Selain menetapkan untuk keluar dari politik praktis dan mengakui Pancasila sebagai azas tunggal, muktamar ini juga berhasil menetapkan pengurus

⁵⁸ Martin Van Bruinessen, 136-137.

baru Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad yang ditunjuk sebagai ulama yang berkompeten dalam pemilihan kemudian menunjuk enam pembantu sebagai *ahlul halli wal aqdi* dan mengajak mereka berdiskusi selama sekitar 25 menit di kantor pesantren. Keenam ulama yang ditunjuk adalah KH. Ali Ma'shum, KH. Machrus Ali, KH. Masykur, KH. Achmad Siddiq, KH. Saifuddin Zuhri dan KH. Munasir Ali. Tujuh orang tersebut kemudian berdiskusi menentukan gambaran calon pemimpin NU dimasa mendatang. Rapat *ahlul halli wal aqdi* itu hanya memerlukan waktu sebentar karena nama-nama pengurus baru itu PBNU itu sudah disusun sebelumnya. Kiai As'ad membuka rapat tersebut dengan dan mengusulkan nama-nama yang sudah tersusun. Tak lama kemudian para ulama langsung menerimanya secara bulat. Kiai As'ad kemudian kembali ke panggung muktamar dan kemudian mengumumkan hasil dari rapat tersebut. Kiai As'ad kemudian mengumumkan hasil diskusi tersebut yang menunjuk ketua kiai Achmad Siddiq serta Abdurrahman Wahid menjadi ketua Dewan Syuriah dan Tanfidziah NU.⁵⁹

Pada Dewan Syuriah, KH. Achmad Siddiq menjadi Rais A'am dengan kiai Radli Saleh sebagai wakilnya. Para Rais lainnya adalah KH. Nadjib Abdul Wahab, KH. Yusuf Hasyim, KH. Tolchah Mansoer, KH. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudz. Sedangkan katib a'am (sekertaris umum syuriah) dijabat KH. Hamid Widjaja. Sedangkan pada dewan tanfidziah Abdurrahman Wahid menjadi ketua umum dengan wakil ketua Mahbub Djunaidi, Fahmi Dja'far Saifuddin, Hasyim Latief,

⁵⁹ Chairul Anam, *Jejak Langkah Sang Guru Bangsa*, 31

Saiful Mudjab, Syah Manaf, dan Romas Djajaseputra. Sekjen PBNU: Anwar Nuris dengan wakil Asnawi Latif dan Ahmad Bagja. Bendahara: Sjaicul Islam dan Said Budairi.⁶⁰

Terpilihnya Achmad Siddiq dan Gus Dur sesuai dengan harapan pemerintah dan juga dengan keinginan para ulama NU. Dengan kemudian NU baru dan babak baru telah dimualai. Kedua tokoh NU tersebut juga dipercaya mampu membawa NU benar-benar kembali ke khittah 1926. Apalagi dalam majelis mustyasar atau penasehat PBNU duduk pula nama-nama besar seperti: KH. As'ad syamsul arifin, KH. Ali Ma'sum, KH. Idham Chalid, KH. Masjkur, KH. Saifuddin Zuhri, KH. Macrus Ali, KH. Anwar Musaddad, KH. Imron Rosyadi dan KH. Moenasir Ali.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 32.

⁶¹ Ibid., 33.